STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA STANDAR PELAYANAN PUBLIK SUBBAG TATA USAHA

Jenis Layanan: Pengajuan Cuti Tahunan/Melahirkan/Haji

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas di Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbuka Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayar Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 20 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tah 2010 tentangGrand Design ReformasiBirokrasi 2010-20: 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Ten ta Kementerian Agama; 7. Permenpan-RB Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedom Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedom Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisip Masyarakat; 9. Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedom Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 10. Permenpan-RB Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedom Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 11. Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunj Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Stane Pelayanan; 12. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedom Inovasi Pelayanan Publik; 14. Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedom Inovasi Pelayanan Publik; 15. Permenpan-RB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedom Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPelaksana Publik; 16. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Star Pelayanan Publik; 17. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Star Pelayanan Publik; 18. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Star Pelayanan Publik; 19. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Star Pelayanan Publik; 20. Persyaratan Persyaratan PenyelenggaraanPelaksana Publik; 21. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Star Pelayanan Publik;	NO	KOMPONEN	URAIAN
12. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tent Pedoman Standar Pelayanan; 13. Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedom Inovasi Pelayanan Publik; 14. Permenpan-RB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedom Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPelaksana Publik; 15. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Star Pelayanan Publik; 2. Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Blangko Persetujuan yang sudah di tandatangani atasan langsung;		KOMPONEN	 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design ReformasiBirokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Ten tang Kementerian Agama; Permenpan-RB Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat; Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Publik; Permenpan-RB Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
	2.	Persyaratan	Pelayanan; 12. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 14. Permenpan-RB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPelaksana Publik; 15. Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Publik; 1. Surat Permohonan; 2. Blangko Persetujuan yang sudah di tandatangani atasan langsung; 3. Surat keterangan dokter (HPL) bagi cuti melahirkan; dan

3.	Sistem, Mekanisme Dan	Calon penerima layanan Mengunjungi halaman
	Prosedur	https://semanak.kemenagjepara.com/index.php/page/sekjen
		kemudian memilih layanan yang diinginkan dan menguploud
		persyaratan yang telah ditentukan, menunggu berkas diproses,
		kemudian menerima hasil layanan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5.	Biaya/ Tarif	0 rupiah (bebas bea)
6.	Produk Pelayanan	Surat Cuti
7.	Sarana, Prasarana Dan Atau	1. PC atau Laptop dan Printer
	Fasilitas	2. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan,
		analisis jabatan, analisis beban kerja pada Kantor Kementerian
		Agama Kabupaten Jepara dan SDM yang telah dilatih untuk
		menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,
		bertanggungjawab, serta santun kepadapihak yang memerlukan.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung.
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
		pengawasan fungsional oleh satgas SPIP Kantor
		Kementerian Agama Kabupaten Jepara
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
10.	Penanganan Pengaduan	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Jalan Ratu
		Kalinyamat Demaan, Kabupaten Jepara - 59419 0291-591035
		kabjepara@kemenenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	Satu Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat efektif dan efisien
		sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan	Surat Cuti hanya diberikan kepada pemohon yang memenuhi
	Keselamatan	Persyaratan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilakukan secara berkala (1 tahun sekali) melalui rapat
		koordinasi.
-		•